

Deskripsi Konseptual tentang Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Misi Pengembangan Moral

Dina Amaria Sembiring^{a,1*}, Dinie Anggraeni Dewi^{a,2}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ dinaamaria9@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 10 Agustus 2021;

Revised: 29 Agustus 2021;

Accepted: 3 September 2021

Kata Kunci:

Pendidikan

Kewarganegaraan;

Pengembangan Moral;

Hak Asasi.

ABSTRAK

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah sebuah misi pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pasal 37 Undang-undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk para mahasiswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan umum Pendidikan Kewarganegaraan memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara. Adapun tujuan khususnya ialah memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis, lalu agar menjadi warga negara yang memiliki komitmen terhadap hak asasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mengalami pengembangan di setiap negara namun setiap pengembangan yang terjadi tidak beda jauh antar satu dengan yang lainnya suatu negara. Setiap dengan negara tersebut memiliki tujuan yang sama ialah menjadikan warga negara yang patuh terhadap aturan pemerintah yang berlaku.

ABSTRACT

The Conceptual Description of The Development of Citizenship Education For Moral Development Mission. Citizenship Education (PKn) is a mission of national moral education, forming intelligent, democratic, and noble citizens, who consistently preserve and develop democratic ideals and build the character of the nation. Citizenship Education as a course article 37 of Law 20 of 2003 on the national education system states citizenship education aims to shape students into human beings who have a sense of nationality and love of the homeland. The general purpose of Citizenship Education is to provide students with basic knowledge and skills regarding the relationship between citizens and countries. The purpose in particular is to understand and carry out the rights and obligations in a polite, honest, and democratic manner, then to become a citizen who has a commitment to human rights. This study uses qualitative method with literature study. The findings show that Citizenship Education is developed in every country but every development that occurs does not differ much from each other. Each of these countries has the same goal of making citizens compliant with the prevailing government rules.

Keywords:

Civics;

Moral Development;

Human Right.

Copyright © 2021 (Dina Amaria Sembiring & Dinie Anggraeni Dewi). All Right Reserved

How to Cite : Sembiring, D. A., & Dewi, D. A. (2021). Deskripsi Konseptual tentang Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Misi Pengembangan Moral. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(9), 300–305. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i9.267>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia secara rohani dan jasmani. Ada juga beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan pendidikan terbagi menjadi beberapa mata pembelajaran diantaranya ada pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki cakupan yang lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia (Azra, 2016). Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pasal 37 undang-undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk para mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Pradana, 2019). Tujuan umum Pendidikan Kewarganegaraan memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara. Adapun tujuan khususnya ialah memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis, memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejujuran, cinta tanah air, lalu agar menjadi warga negara yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan memberikan demokrasi serta memberikan kontribusi (Genika, & Dewi, 2021).

Penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran konseptual tentang perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan untuk misi pengembangan moral. Gambaran yang diwacanakan peneliti lebih pada elaborasi dari beberapa negara yang mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan dalam multi dimensi. Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks Indonesia, Australia dideskripsikan dengan merujuk pada sejarah awal tentang kewarganegaraan di Yunani yang menekankan pentingnya nilai-nilai moral dalam diri warga negara.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Penelitian deskriptif berupaya untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Metode deskriptif ditunjukkan untuk mencari makna dengan interpretasi yang tepat sehingga penelitian ini bisa mendeskripsikan suatu gejala dan juga peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Penelitian ini mengumpulkan data dari beberapa sumber seperti artikel ilmiah, buku referensi, dan data aktual di internet. Peneliti kemudian mendeskripsikan data kepustakaan dan melakukan interpretasi untuk sampai pada penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia ada dalam konteks persekolahan (*school civic education*). Persekolahan pertama kali muncul nama kewarganegaraan (1957), lalu *civics* (1961) lalu setelah itu Pendidikan kewarganegaraan negara (1968) pendidikan moral Pancasila (1957) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada 1944. Kewarganegaraan pada uji coba kurikulum tahun 2004 dan pendidikan kewarganegaraan pada tahun 2006.

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia memiliki makna filosofis sebagai fondasi kekuatan ligatur dalam pembentukan mental multikultural pluralisme guna mewujudkan cita-cita nasional serta pemodernan bangsa dan negara tanpa meninggalkan kearifan lokal yang telah diajarkan para leluhur sejak dulu (Wibowo, & Wahono, 2017).

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan Australia diperkenalkan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan perkembangan Pendidikan yang fokus utamanya ada pada warga negara di berbagai negara dan perbandingan internasional termasuk di Australia untuk menambah wawasan yang berguna dalam rangka memahami berbagai isu kewarganegaraan, termasuk pengembangan kebijakan serta pelaksanaan inisiatif baru dengan mengacu pada. Ian Davies berpendapat bahwa pengenalan pendidikan kewarganegaraan secara umum merupakan relasi kebutuhan yang dirasakan untuk menanggapi hubungan politik baru baik di dalam maupun antar negara dan keinginan untuk mengembangkan lebih banyak pengetahuan serta partisipasi aktif dalam norma-norma sosial yang ada.

Pemerintah Australia telah mendukung penerapan kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di sekolah melalui *Discovering Democracy* (1997- 2004), selanjutnya *Civics and Citizenship Education (CCE) Program* (sejak 2004), dan *the Parliament and Civics Education Rebarc (PACER)* sejak 2006. *Discovering Democracy* merupakan salah satu perkembangan yang mendasar dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Australia. Materi ini diajarkan untuk sekolah dasar (*primary school*) dan sekolah menengah (*middle school*). Panduan *Discovering Democracy* dan pelatihan pengembangan guru profesional dilakukan di semua negara dan wilayah teritorial Australia untuk melaksanakan kesuksesan program *Discovering Democracy* tersebut (Criddle, Vidovich, & O'Neill, 2004).

Guru diberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai konsep dan materi *Discovering Democracy*, sehingga mampu terlibat dalam pendekatan pedagogis untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang lembaga-lembaga demokrasi, sejarah, nilai-nilai, dan proses demokrasi di Australia. Pada bulan April 1999, Menteri Pendidikan Negara dan Persemajukan mengadakan pertemuan di Dewan Kesepuluh Menteri Pendidikan, Ketenagakerjaan, Pelatihan dan Lulusan Pemuda (, dan menyetujui diterapkannya *National Goals for Schooling in the Twenty-First Century*. dua tujuan yaitu: 1) Siswa harus memiliki kapasitas untuk melakukan penilaian serta bertanggung jawab dalam hal moralitas, etika, dan keadilan sosial, memiliki kemampuan untuk memahami dunia mereka, untuk berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri, membuat keputusan yang rasional dan mendapatkan informasi tentang kehidupan mereka 2) Ketika siswa meninggalkan sekolah, mereka harus menjadi warga negara yang aktif dan memiliki pemahaman serta apresiasi terhadap sistem pemerintahan Australia dan kehidupan masyarakat sipil.

Yunani dan Romawi memiliki sejarah pendidikan kewarganegaraan yang berbeda. Menurut Heater (2004: 17-18) setidaknya ada tiga perbedaan utama antara kewarganegaraan Yunani dan Romawi. Pertama, kewarganegaraan Yunani, terutama di Athena, merupakan konsep yang bersifat politis. Mendefinisikan status warga negara dari fungsi politik. Sedangkan Romawi mendefinisikan kewarganegaraan terutama dari aspek hukum. Status warga negara dilihat dari hak-haknya secara hukum. Namun demikian, kedua bangsa itu pada kenyataannya mengharapkan bahwa setiap warga negara memiliki kualitas kebajikan (*arete*) dan *virtus* dalam bahasa masing-masing. Kedua, pendidikan di Yunani, digagas untuk mencapai tujuan sipil yang berbeda dengan pelatihan militer. Fokus pendidikan adalah mampu menumbuhkan jiwa atau kepribadian yang bijaksana dengan suasana pendidikan afektif penuh kedisiplinan.

Seni, terutama musik, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pendidikan di Yunani. Sedangkan bagi bangsa Romawi, musik dan tarian dinilai sebagai sesuatu yang merendahkan martabat. Pendidikan kewarganegaraan lebih bersifat pragmatis, yaitu berkaitan dengan belajar mengenai kehidupan dan bagaimana menafsirkan hukum. Ketiga, bangsa Yunani lebih menekankan pada perlunya institusionalisasi pendidikan di sekolah. Pendidikan memerlukan kurikulum khusus yang berisi program untuk membentuk warga negara yang memiliki loyalitas kuat terhadap negara. Sedangkan bangsa Romawi lebih memiliki keyakinan bahwa pendidikan pada dasarnya merupakan tanggung jawab keluarga. Dalam keluarga seorang anak dikembangkan pemahaman dan pengetahuannya mengenai hak-haknya sebagai warga negara. Keluarga merupakan esensi kehidupan

bangsa Romawi. Bahkan, sepanjang zaman Republikan, status orang tua melakukan pendidikan kepada anak-anak mereka. Ibu atau anggota keluarga perempuan dewasa dari keluarga membentuk karakter anak-anak yang masih muda dalam suatu keluarga. Status kewarganegaraan di Romawi tidak serta merta dimiliki oleh warga yang terlahir di Romawi (Heater, 2004).

Ada persyaratan khusus untuk memperoleh status kewarganegaraan Romawi. Kewarganegaraan tidak bisa dimiliki oleh budak, anak ilegal, dan pendatang. Untuk mendapatkan kewarganegaraan, awalnya melalui sebuah upacara sederhana. Seorang ayah yang telah menjadi warga negara akan membawa anaknya yang baru lahir sebagai bentuk pengakuan. Selanjutnya, pengakuan ini dibuat oleh anggota keluarga yang sudah dewasa dan diawasi atau dikontrol dengan sensus setiap lima tahun sekali. Seorang ayah, memiliki peran penting dalam melakukan pendidikan dan pelatihan anak-anaknya. Anak-anak dididik dari usia 7 sampai 16 tahun tentang berbagai aspek dalam kehidupan (Heater, 2004).

Seorang ayah berperan penting dalam meletakkan tujuan fundamental kewarganegaraan. Setiap anak muda dididik dalam keluarga untuk memahami, bangga, dan mematuhi hukum yang berlaku. Selain itu, upacara sipil dan keagamaan memainkan peran penting untuk memperkuat proses sosialisasi. Kewarganegaraan Romawi terbentuk berdasarkan pola hak dan kewajiban. Kewajiban adalah pelayanan militer dan pembayaran beberapa pajak. Biasanya berkaitan dengan pajak kepemilikan tanah dan pajak harta warisan. Di samping kewajiban warga negara, ada juga kebajikan kewarganegaraan yang ideal, hampir sama dengan konsep *arete* di Yunani di abad klasik masih terus berkembang dan berguna pada masa berikutnya. Gaya pendidikan Yunani dan Romawi menjadi inspirasi bagi pendidikan kewarganegaraan di masa Renaissance. Bahkan, terus berkembang dan berpengaruh terhadap pendidikan kewarga negaran di abad modern. Perkembangan pendidikan kewarganegaraan di abad modern, tidak terlepas dari ide-ide Platonis, Aristotelian, dan pendidikan gaya Romawi (Faas, 2011).

Pendidikan kewarganegaraan di sekolah berasal dari Asosiasi Pendidikan Kewarganegaraan berisi seruan kepada sekolah untuk memerangi kebangkitan fasisme di Jerman. Setelah perang 1939-1945, pemerintah mengeluarkan dokumen yang berjudul "*Citizen Growing Up*" tahun 1949 yang menekankan peran penting yang harus dimainkan oleh sekolah untuk mendorong kewarganegaraan dan meningkatkan kesadaran tentang penggunaan pendidikan sebagai cara untuk memerangi sejumlah misi persuasif pemikiran politik yang ekstrem. Kerr (2014) menjelaskan ada eksplanasi tentang "*the three Cs of citizenship*" (*curriculum, culture, and community*). Kewarganegaraan dalam kurikulum (*citizenship in the curriculum*) merupakan kewarganegaraan yang disampaikan sebagai mata pelajaran yang terpisah atau berdiri sendiri dan memiliki keterkaitan dengan mata pelajaran lain. Kewarganegaraan dalam budaya sekolah (*citizenship in the school culture*) merupakan kewarganegaraan sebagai proses demokrasi yang lebih luas dan merupakan praktik bagi para siswa pada semua institusi, termasuk kesempatan untuk berpartisipasi melalui mekanisme formal (Kerr, 2014).

Kewarganegaraan melalui hubungan dengan masyarakat luas (*citizenship through links with the wider community*) merupakan kewarganegaraan yang menghubungkan siswa di sekolah dengan mitra dalam masyarakat lokal, nasional, dan internasional. Di negara liberal yang lain, seperti Amerika Serikat, pendidikan kewarganegaraan juga lebih mengedepankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan modern di Amerika Serikat sebelum tahun 1916 merupakan bagian dari mata pelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah di Amerika Serikat memang mendominasi untuk pelajaran ilmu sosial. Pendidikan kewarganegaraan pertama kali digagas oleh kelompok studi kewarganegaraan di bawah Komisi Reorganisasi Pendidikan Menengah Amerika Serikat. Komisi ini pada tahun 1916, mengusulkan dua perubahan besar yang memiliki dampak jangka panjang pada pengajaran kewarganegaraan di Amerika Serikat (Scott, & Cogan, 2008). Perubahan pertama, mengusulkan pengembangan program baru pada kelas sembilan dengan nama "*Community Civics*".

Program ini menjadi program dasar karena banyak siswa yang tidak melanjutkan sekolah setelah lulus dari kelas sembilan. Perubahan kedua, di kelas 12 yang merupakan tahun terakhir di sekolah menengah, bagi mereka yang tidak akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, diberi program dengan nama “Problems of Democracy”. Tahun 1990-an merupakan era baru dalam pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat. Pada tahun 1991 ada kerangka kerja baru untuk pendidikan kewarganegaraan yang disebut dengan *CIVITAS (Centre for Civic Education)* dan kemudian pada tahun 1994 diikuti dengan keluarnya *National Standard for Civics and Government*. Adanya dokumen itu mengisyaratkan perubahan besar terhadap dokumen kewarganegaraan sebelumnya yang dibuat pada tahun 1916 (Gonzales, Riedel, Avery, & Sullivan, 2001).

Pendidikan Kewarganegaraan di era global harus mampu membantu siswa untuk mengembangkan identitas dan keterikatan mereka sebagai masyarakat global yang terkoneksi dengan seluruh orang di berbagai belahan dunia. Keanekaragaman (*diversity*) menyajikan tantangan bagi pendidikan kewarganegaraan di seluruh dunia. Untuk secara efektif mempersiapkan siswa untuk menjadi reflektif, konstruktif, dan kontribusi lokal, nasional, dan warga global, sekolah harus serius mengatasi keragaman. Mengacu pada konsep demokrasi dan keberagaman yang dikembangkan Banks (2004) maka prinsip yang seharusnya ditanamkan melalui CCE yaitu: siswa harus belajar tentang hubungan yang kompleks antara kesatuan dan keragaman dalam komunitas lokal mereka, bangsa, dan dunia.

Pendidikan kewarganegaraan seharusnya mampu membantu siswa untuk memahami konsep keragaman secara internal maupun komparatif melalui contoh praktis yang diberikan oleh guru. Siswa terlibat dalam bentuk kesukarelaan dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Jayadi, & Dewi, 2021). Guru diharapkan mampu menyajikan isu-isu dan pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan masyarakat multikultur seperti isu rasial, kelas, etnis, perbedaan agama, jender, dan keragaman bahasa. Siswa harus mengetahui bagaimana negara menyikapi ketidakadilan diantara perbedaan status sosial masyarakat. Peran negara menyikapi keterbatasan dan kelemahan dalam konsep bersatu dalam perbedaan.

Negara mendefinisikan konsep kewarganegaraan dan apa yang seharusnya dilakukan oleh siswa sebagai warga negara Indonesia, bagaimana anggota masyarakat yang memiliki kewarganegaraan berbeda harus bersikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Siswa harus belajar tentang cara-cara dimana orang dalam komunitas mereka, bangsa, dan daerah semakin saling tergantung dengan orang lain di seluruh dunia dan terhubung ke ekonomi, politik, budaya, perubahan lingkungan, dan teknologi. Isu-isu seperti perdagangan bebas, kemajuan ilmu dan teknologi, penggunaan lahan, polusi, pemanasan global, keterbatasan sumber daya alam suatu negara telah mendorong suatu bangsa untuk memperkuat hubungan dengan negara lain (Wadu, Kasing, Gultom, & Mere, 2021). Siswa harus dikenalkan dengan perkembangan dunia di era global, bagaimana a warga Negara seharusnya bersikap dalam percaturan ekonomi, politik, budaya, dan teknologi yang terjadi di seluruh dunia.

Simpulan

Pendidikan Kewarganegaraan di era global harus mampu membantu siswa untuk mengembangkan identitas dan keterikatan mereka sebagai masyarakat global yang terkoneksi dengan seluruh orang di berbagai belahan dunia. Sekolah harus membantu siswa untuk memahami bagaimana budaya, identifikasi nasional, regional, dan global yang saling terkait, kompleks, dan berkembang. Sekolah juga diharapkan dapat membantu siswa untuk menyadari bahwa sebagai warga negara dari komunitas global, siswa wajib mengembangkan pemahaman dan kebutuhan untuk mengambil tindakan atau membuat keputusan untuk membantu memecahkan masalah dunia yang sulit. Sebagai guru pasti memiliki tantangan dalam mengajar pendidikan kewarganegaraan oleh karna itu guru harus menyikapinya dengan sebaik-baiknya agar materi yang diajarkan tersampaikan dengan baik serta pendidik bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tugas kita sebagai pendidik hendaknya

mengikuti aturan yang berlaku karna dengan aturan tersebut dapat mensejahterakan semuanya dan sebaiknya juga kita mau cinta terhadap negara kita dan mau mengharumkan nama baik negara.

Referensi

- Almond, G.A. and Verba, S., (2015). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Banks, J. A. (2004, December). Teaching for social justice, diversity, and citizenship in a global world. In *The educational forum* (Vol. 68, No. 4, pp. 296-305). Taylor & Francis Group.
- Criddle, E., Vidovich, L., & O'Neill, M. (2004). Discovering democracy: An analysis of curriculum policy for citizenship education. *Westminster studies in education*, 27(1), 27-41.
- Faas, D. (2011). The Nation, Europe, and Migration: A comparison of geography, history, and citizenship education curricula in Greece, Germany, and England. *Journal of Curriculum Studies*, 43(4), 471-492.
- Genika, P. R., & Dewi, D. A. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Keterkaitan Dengan Pendidikan Karakter di Indonesia. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 1(2), 33-40. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/konstruksi-sosial/article/view/220>
- Gonzales, M. H., Riedel, E., Avery, P. G., & Sullivan, J. L. (2001). Rights and obligations in civic education: A content analysis of the National Standards for Civics and Government. *Theory & Research in Social Education*, 29(1), 109-128.
- Heater, D. (2004). *Citizenship: The civic ideal in world history, politics and education*. Manchester University Press.
- Jayadi, N. L., & Dewi, D. A. (2021). Nilai Kesukarelaan dalam Mengantisipasi Bencana Alam sebagai Bentuk Penerapan Sila Kedua Pancasila. *Rhizome: Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 1(2), 33-38. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/rhizome/article/view/230>
- Pradana, Y. (2019). Pengembangan Karakter Siswa Melalui Budaya Sekolah. *Untirta Civic Education Journal*, 1(1).
- Scott, T., & Cogan, J. J. (2008). Democracy at a Crossroads: Political Tensions Concerning Educating for Citizenship in the United States. In *Citizenship curriculum in Asia and the Pacific* (pp. 165-179). Springer, Dordrecht.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 41-50.
- Wadu, L. B., Kasing, R. N. D., Gultom, A. F., & Mere, K. (2021, April). Child Character Building Through the Takaplager Village Children Forum. In *2nd Annual Conference on Social Science and Humanities (ANCOSH 2020)* (pp. 31-35). Atlantis Press.
- Wibowo, A. P., & Wahono, M. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: usaha konkret memperkuat multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 196-205.